



Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mitigasi Krisis Sosial Banjir Tahunan: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024

Dina Fadiyah^{1*}, Agustinus¹

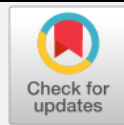
¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Indonesia, 15437, Banten-Indonesia

*Korespondensi: dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

31 Maret 2026



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2026 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Fadiyah, D., & Agustinus. (2026). Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mitigasi Krisis Sosial Banjir Tahunan: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024. *Journal of Politics and Democracy*, 5(2), 82-95. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v5i1.183>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik dalam mitigasi krisis sosial akibat banjir tahunan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga terdampak banjir. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif untuk memahami kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih belum optimal. Meskipun respons tanggap darurat relatif cepat, kebijakan belum mampu memenuhi dimensi efektivitas, responsivitas, dan kecukupan secara menyeluruh. Permasalahan utama meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaktepatan program fisik yang mengabaikan kearifan lokal, rendahnya transparansi dalam distribusi bantuan, serta terbatasnya perhatian terhadap dimensi sosial dan psikologis masyarakat terdampak. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan masih bersifat simbolik, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang kontekstual dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan kelemahan tata kelola kebijakan dalam mengintegrasikan dimensi kelembagaan, sosial, dan partisipatif. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang guna mengurangi kerentanan sosial masyarakat terhadap bencana berulang.



Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of public policy in mitigating the social crisis caused by annual flooding in West Kutai Regency in 2024. The study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving local government officials, community leaders, and affected residents. The data were analyzed using a descriptive-interpretative approach to examine the gap between policy design and its implementation. The findings indicate that policy effectiveness remains suboptimal. Although the initial emergency response was relatively rapid, the policy failed to fulfill key dimensions of effectiveness, responsiveness, and adequacy. The main issues include weak inter-agency coordination, inappropriate physical programs that neglect local knowledge, low transparency in aid distribution, and limited attention to the social and psychological dimensions of affected communities. Furthermore, community participation in policy planning remains largely symbolic, resulting in policies that are less contextual and less responsive to local needs. This study highlights that disaster mitigation challenges are not merely technical issues but also reflect weaknesses in governance, particularly in integrating institutional, social, and participatory dimensions. Therefore, improving policy effectiveness requires a more integrated, participatory, and long-term recovery-oriented approach to reduce social vulnerability in disaster-prone areas.

Kata Kunci Akuntabilitas, Bencana Banjir, Krisis Sosial, Partisipasi Masyarakat, Trauma Healing.

1. Pendahuluan

Peristiwa banjir tahunan yang melanda Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tidak lagi dapat dipahami semata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai persoalan kebijakan publik yang mencerminkan kapasitas negara dalam mengelola risiko dan memitigasi krisis sosial yang ditimbulkannya. Pada periode 18–23 Mei 2024, bencana hidrometeorologi kembali terjadi dan mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menetapkan status tanggap darurat hingga 29 Mei 2024. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga gangguan sosial yang signifikan, ditandai dengan terendahnya ratusan rumah warga dan ketinggian air mencapai 1–1,5 meter di Kecamatan Melak, Long Iram, dan Tering. Dalam konteks ini, banjir tahunan di Kubar harus diposisikan sebagai krisis sosial berulang yang memerlukan evaluasi kebijakan secara sistematis dan berbasis bukti.

Dalam kajian kebijakan publik, evaluasi merupakan tahap krusial untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menegaskan bahwa evaluasi kebijakan publik mencakup penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan dalam menjawab masalah publik (Dunn, 2018). Dalam konteks bencana, dimensi efektivitas tidak hanya berkaitan dengan

kecepatan respons darurat, tetapi juga kemampuan kebijakan dalam mengurangi kerentanan sosial dan memastikan keberlanjutan pemulihan masyarakat terdampak. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja yang dikembangkan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction yang menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus bersifat proaktif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang (UNDRR, 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan banjir dan mitigasinya, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Putra (2015) menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kutai Barat masih menghadapi kendala dalam koordinasi kelembagaan dan efektivitas implementasi di tingkat daerah. Sementara itu, Paimin et al. (2009) menekankan pentingnya pendekatan teknis melalui pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi risiko banjir, khususnya melalui pengendalian limpasan permukaan dan konservasi lahan. Di sisi lain, penelitian oleh Rosyida et al. (2025) menunjukkan bahwa aktivitas antropogenik seperti pembukaan lahan dan degradasi hutan di hulu DAS Mahakam berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di wilayah hilir.

Literatur yang ada cenderung memisahkan antara pendekatan teknis lingkungan dan analisis kebijakan publik. Sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek hidrologi dan infrastruktur, sementara dimensi krisis sosial—seperti trauma psikologis, ketimpangan distribusi bantuan, dan kerentanan ekonomi berulang—belum menjadi fokus utama. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Blaikie et al. dalam kerangka Pressure and Release Model, bencana pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara bahaya alam dan kerentanan sosial yang dibentuk oleh struktur ekonomi, politik, dan kebijakan (Blaikie et al., 1994). Dengan kata lain, kegagalan mitigasi tidak hanya bersumber dari faktor alam, tetapi juga dari kelemahan kebijakan dalam mengelola kerentanan tersebut. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara spesifik mengevaluasi respons kebijakan tanggap darurat pada periode kejadian tertentu. Padahal, setiap episode bencana memiliki dinamika implementasi kebijakan yang berbeda, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi, distribusi bantuan, dan keterlibatan masyarakat. Studi oleh Kapucu menekankan bahwa kegagalan dalam manajemen bencana seringkali disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas organisasi dan kurangnya integrasi dalam sistem respons darurat (Kapucu, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat celah riset yang jelas. Pertama, masih terbatasnya evaluasi empiris terhadap efektivitas kebijakan tanggap darurat di tingkat lokal, khususnya pada kasus banjir tahunan di Kabupaten Kutai Barat periode Mei 2024. Kedua, kurangnya integrasi analisis antara respons kebijakan jangka pendek dengan faktor struktural jangka panjang seperti degradasi lingkungan dan tata kelola partisipatif. Ketiga, minimnya perhatian terhadap dimensi krisis sosial sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan mitigasi bencana.

Penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas kebijakan publik dalam mitigasi krisis sosial akibat banjir tahunan di Kabupaten Kutai Barat, dengan lokus pada Kecamatan Melak, Long Iram, dan Tering. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kebijakan tanggap darurat diimplementasikan, sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons kebutuhan masyarakat terdampak, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas kebijakan publik dalam merespons krisis sosial akibat banjir tahunan periode Mei 2024 di Kabupaten Kutai Barat. Secara spesifik,

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dalam aspek kecepatan, ketepatan sasaran, dan koordinasi antarinstansi; mengidentifikasi kendala struktural dan implementatif; serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif kebijakan publik dengan analisis krisis sosial dalam konteks bencana hidrometeorologi berulang. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat analisis, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kinerja kebijakan, tetapi juga mengungkap bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di tingkat lokal.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik merepresentasikan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk merespons berbagai persoalan publik, termasuk dalam konteks penanggulangan bencana. Pemerintah tidak hanya merumuskan kebijakan sebagai dokumen formal, tetapi juga mengimplementasikannya melalui berbagai instrumen kelembagaan dan program konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik harus mencakup keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi terhadap dampak yang dihasilkan. Dalam kerangka ini, William N. Dunn menegaskan bahwa evaluasi kebijakan harus mengukur kinerja kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2018).

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Thahir (2019) menemukan bahwa kelemahan koordinasi antarinstansi dan rendahnya kapasitas implementasi seringkali menghambat pencapaian tujuan kebijakan di tingkat lapangan. Pemerintah daerah kerap menghadapi situasi di mana kebijakan telah dirancang dengan baik secara normatif, tetapi gagal diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif dan tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh kemampuan aktor pelaksana dalam mengoordinasikan sumber daya dan merespons dinamika lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak membatasi evaluasi kebijakan pada aspek administratif atau formal semata, tetapi secara aktif menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak banjir. Penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai pusat analisis dengan menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan benar-benar responsif terhadap kondisi sosial yang dihadapi, termasuk dalam hal distribusi bantuan, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan pascabencana. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dalam penelitian ini berfungsi tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen kritis untuk mengungkap kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan.

Kebijakan dalam Konteks Manajemen Bencana

Kebijakan publik dalam konteks bencana menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan dalam kondisi normal, karena pemerintah harus mengambil keputusan dalam situasi darurat yang ditandai oleh ketidakpastian tinggi, keterbatasan sumber daya, serta tekanan waktu yang sangat sempit. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap

terkoordinasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dalam konteks bencana harus ditempatkan dalam kerangka manajemen bencana yang bersifat siklikal dan terintegrasi.

Kerangka yang dikembangkan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction melalui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction menegaskan bahwa pemerintah harus mengelola bencana melalui empat fase utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, yang saling terhubung sebagai satu kesatuan sistem (UNDRR, 2015). Pemerintah tidak dapat hanya berfokus pada respons darurat, tetapi harus secara aktif membangun kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko di masa depan. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan dalam konteks bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah merespons kejadian, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi potensi dampak bencana sebelum terjadi dan mempercepat pemulihan setelahnya.

Praktik kebijakan di tingkat daerah seringkali menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Banyak pemerintah daerah masih memprioritaskan respons jangka pendek dibandingkan dengan pembangunan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Studi oleh Padang et al. (2020) menunjukkan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Kutai Barat cenderung berfokus pada pendekatan teknis-infrastruktur, seperti pembangunan drainase dan perbaikan saluran air, tanpa diimbangi dengan strategi mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip manajemen bencana yang komprehensif. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan bersifat reaktif dan berulang, sehingga gagal memutus siklus bencana tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan integrasi kebijakan dalam seluruh siklus manajemen bencana sebagai indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik.

Kerentanan Sosial dan Krisis Sosial dalam Bencana

Pendekatan kontemporer dalam studi bencana secara tegas menggeser fokus analisis dari semata-mata bahaya alam menuju kerentanan sosial sebagai faktor penentu utama dampak bencana. Dalam perspektif ini, bencana tidak lagi dipahami sebagai kejadian alam yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara bahaya alam dan kondisi sosial masyarakat. Piers Blaikie melalui kerangka Pressure and Release Model menjelaskan bahwa bencana terjadi ketika tekanan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan lemahnya tata kelola bertemu dengan ancaman alam (Blaikie et al., 1994). Dengan demikian, tingkat kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh bencana sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat berada dalam kondisi rentan.

Dalam konteks lokal, dinamika kerentanan tersebut semakin diperparah oleh faktor lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Penelitian Rosyida et al. (2025) menunjukkan bahwa degradasi lingkungan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, telah meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir di wilayah hilir, termasuk Kabupaten Kutai Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko bencana tidak hanya bersumber dari faktor alam, tetapi juga dari keputusan kebijakan yang memengaruhi kondisi ekologis wilayah. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap lingkungan justru dapat memperbesar kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Kerentanan yang dihadapi masyarakat tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi bantuan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat

miskin menunjukkan bahwa dampak bencana tidak terdistribusi secara merata. Dalam situasi ini, kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menentukan apakah kerentanan tersebut akan berkurang atau justru semakin meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kemampuan kebijakan dalam mengurangi kerentanan sosial sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan mitigasi bencana. Kebijakan yang hanya berfokus pada aspek fisik tanpa memperhatikan dimensi sosial akan cenderung gagal dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan evaluasi kebijakan sebagai pisau analisis utama dengan merujuk pada kriteria efektivitas, responsivitas, dan pemerataan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2018). Kerangka ini kemudian ditempatkan dalam konteks manajemen bencana yang bersifat siklikal menurut UNDRR (2015), serta dianalisis lebih lanjut berdasarkan kemampuan kebijakan dalam mengurangi kerentanan sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Blaikie et al. (1994). Dengan demikian, seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara interpretatif untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu merespons krisis sosial secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis efektivitas kebijakan publik dalam mitigasi banjir tahunan di Kabupaten Kutai Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan kebijakan dalam konteks yang nyata, khususnya terkait dengan proses implementasi kebijakan serta dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat terdampak. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Sementara itu, studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu fenomena spesifik dalam ruang lingkup tertentu, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap dinamika kebijakan di Kabupaten Kutai Barat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan, seperti pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, tokoh masyarakat, serta warga terdampak banjir. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan, baik terkait infrastruktur mitigasi maupun kondisi sosial masyarakat pascabencana. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen resmi, seperti peraturan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah, serta sumber informasi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam (Sugiyono, 2019).

Peneliti juga berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menjaga konsistensi pertanyaan sekaligus memberikan ruang bagi informan dalam mengembangkan jawaban mereka. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengungkap makna di balik temuan empiris yang diperoleh.

Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, proses, dan konteks sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sehingga analisis dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan (Moleong, 2017). Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terkait efektivitas kebijakan publik dalam menghadapi krisis sosial akibat banjir tahunan.

4. Hasil dan Pembahasan

Sinkronisasi Birokrasi dan Realitas Respons Kedaruratan

Dalam konteks kebencanaan, respons cepat merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah pada fase tanggap darurat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kecepatan respons tersebut tidak selalu diikuti oleh efektivitas implementasi di tingkat operasional. Data wawancara mengungkapkan bahwa proses penyaluran bantuan seringkali menghadapi hambatan yang bersumber dari prosedur birokrasi yang kompleks, kondisi geografis yang sulit, serta keterbatasan infrastruktur logistik. Informan dari unsur pemerintah daerah mengakui bahwa mobilisasi bantuan ke wilayah terdampak dapat memakan waktu hingga belasan jam, terutama pada daerah dengan akses terbatas. Selain itu, ditemukan adanya tumpang tindih koordinasi antarinstansi yang menyebabkan distribusi bantuan menjadi kurang terarah dan tidak efisien.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam respons kedaruratan tidak terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada lemahnya sinkronisasi kelembagaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mahmud (2022) yang menekankan bahwa hambatan dalam manajemen bencana seringkali bersumber dari fragmentasi koordinasi antarorganisasi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep silo mentality, di mana setiap instansi bekerja berdasarkan prosedur internal masing-masing tanpa adanya integrasi komando yang efektif di lapangan. Akibatnya, meskipun kebijakan secara administratif telah dijalankan, implementasinya tidak mampu menghasilkan respons yang cepat dan terkoordinasi.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kondisi tersebut mencerminkan rendahnya efektivitas dan responsivitas kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, karena kebijakan belum mampu memberikan respons yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak (Dunn, 2018). Lebih lanjut, dalam kerangka manajemen bencana yang dikembangkan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction, fase tanggap darurat menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang terintegrasi serta sistem komando yang jelas untuk memastikan efektivitas respons (UNDRR, 2015). Dengan demikian, lemahnya koordinasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan.

Lebih jauh, temuan ini juga mengindikasikan perlunya penguatan sistem komando dan integrasi kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan tanggap darurat. Fragmentasi kewenangan antarinstansi menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme koordinasi yang mampu menyatukan berbagai aktor dalam satu garis komando operasional yang jelas. Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi menyebabkan setiap instansi cenderung bekerja secara sektoral, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan dan distribusi bantuan. Di sisi lain, tantangan geografis yang kompleks menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada kesiapan sistem logistik yang adaptif terhadap kondisi wilayah.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan dalam konteks tanggap darurat tidak hanya ditentukan oleh kecepatan respons awal, tetapi juga oleh kesiapan sistem birokrasi dan logistik

yang telah dirancang sebelum bencana terjadi. Ketidaksiapan dalam aspek koordinasi dan integrasi kelembagaan menyebabkan respons yang diberikan cenderung bersifat reaktif dan tidak sistematis. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan mitigasi bencana memerlukan penguatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor secara operasional, memperjelas sistem komando, serta memastikan kesiapan logistik yang responsif terhadap kondisi lapangan.

Ketidaksesuaian Program Fisik dan Pentingnya Kearifan Lokal

Temuan lapangan menunjukkan bahwa program pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan banjir berulang yang dialami masyarakat. Warga terdampak mengungkapkan bahwa berbagai intervensi infrastruktur, seperti peninggian jalan dan pembangunan siring, memang telah dilakukan. Namun demikian, upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi risiko banjir. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menilai bahwa pembangunan siring menyebabkan air bertahan lebih lama di kawasan permukiman, sehingga memperparah genangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan berbasis teknis dengan realitas ekologis dan sosial di tingkat lokal.

Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan yang bersifat top-down dengan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat. Warga yang telah lama bermukim di wilayah rawan banjir memiliki pemahaman empiris mengenai pola aliran air, titik rawan genangan, serta dinamika lingkungan setempat. Namun, pengetahuan ini tidak terintegrasi secara memadai dalam proses perencanaan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat teknokratis dan kurang kontekstual. Temuan ini sejalan dengan kritik dalam literatur pembangunan berbasis bencana yang menekankan bahwa pendekatan top-down yang mengabaikan kearifan lokal seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak efektif bahkan kontraproduktif (Agustinus, 2022).

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan rendahnya ketepatan (appropriateness) dan kecukupan (adequacy) kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, karena kebijakan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat terdampak secara kontekstual (Dunn, 2018). Lebih lanjut, dalam kerangka kerentanan sosial yang dikembangkan oleh Piers Blaikie, kegagalan kebijakan dalam mengintegrasikan kondisi sosial dan ekologis lokal justru dapat memperkuat kerentanan masyarakat terhadap bencana (Blaikie et al., 1994). Dengan demikian, ketidaktepatan program fisik tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam memahami interaksi antara lingkungan dan struktur sosial masyarakat.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan mitigasi bencana sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan lokal yang bersifat kontekstual. Ketika proses perencanaan didominasi oleh pendekatan teknokratis tanpa melibatkan masyarakat secara substantif, kebijakan yang dihasilkan cenderung kehilangan relevansi di tingkat implementasi. Dalam konteks ini, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai sumber pengetahuan penting yang dapat meningkatkan ketepatan dan keberlanjutan kebijakan. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa penguatan efektivitas kebijakan mitigasi bencana memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, yang mampu menjembatani antara perencanaan teknis dan realitas sosial-ekologis di lapangan.

Transparansi Bantuan dan Krisis Kepercayaan Publik

Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan merupakan aspek krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan pada fase tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa aspek ini masih menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Warga terdampak mengungkapkan bahwa meskipun mereka dilibatkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), keputusan yang dihasilkan seringkali mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas. Selain itu, muncul keluhan mengenai ketidakadilan dalam distribusi bantuan, di mana terdapat persepsi bahwa penerima bantuan tidak sepenuhnya mencerminkan kelompok yang paling membutuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme formal partisipasi dan praktik implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa turut memengaruhi kualitas transparansi yang dijalankan. Informan mengakui bahwa mekanisme sosialisasi dan penyampaian informasi masih terbatas pada media konvensional, seperti pengumuman di papan desa, yang tidak sepenuhnya efektif menjangkau seluruh masyarakat. Di sisi lain, mekanisme pengaduan yang terbatas menyebabkan masyarakat tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyampaikan keluhan atau mengoreksi ketidaksesuaian data penerima bantuan. Akibatnya, niat pemerintah untuk membangun keterbukaan informasi tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik, sehingga memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sri Adhariani dan Afrizal yang menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan lemahnya mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan dapat membuka ruang bagi praktik penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Adhariani & Afrizal, 2021). Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai instrumen penting dalam menjamin keadilan distribusi sumber daya publik. Ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka dan mekanisme pengaduan tidak tersedia secara memadai, maka akuntabilitas kebijakan menjadi lemah dan berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan rendahnya dimensi pemerataan (equity) dan responsivitas sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, karena kebijakan belum mampu menjangkau kelompok sasaran secara adil serta belum responsif terhadap keluhan masyarakat (Dunn, 2018). Lebih jauh, dalam kerangka kerentanan sosial yang dikembangkan oleh Piers Blaikie, ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan lemahnya akses terhadap informasi justru dapat memperdalam kerentanan masyarakat terdampak (Blaikie et al., 1994). Dengan demikian, persoalan transparansi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kondisi sosial dan kepercayaan publik.

Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan mitigasi bencana tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah dalam membangun sistem komunikasi publik yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan SDM tidak dapat dijadikan justifikasi atas lemahnya transparansi, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari tantangan tata kelola yang perlu diatasi secara sistemik. Oleh karena itu, penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting dalam memastikan bahwa kebijakan

tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.

Mitigasi yang Mengabaikan Dimensi Sosial dan Psikologis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak banjir tahunan di Kabupaten Kutai Barat tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik dan gangguan logistik, tetapi juga meluas pada dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Warga terdampak mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi, khususnya pada sektor perkebunan seperti panen sawit, terjadi secara berulang tanpa adanya perlindungan melalui skema asuransi atau dukungan pembiayaan pascabencana. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berada dalam situasi kerentanan finansial yang berkelanjutan. Di sisi lain, dampak psikologis juga terlihat secara signifikan, terutama pada anak-anak yang mengalami ketakutan terhadap hujan sebagai pemicu banjir. Namun demikian, layanan pemulihan psikologis seperti trauma healing yang disediakan oleh pemerintah bersifat sangat terbatas dan hanya dilakukan dalam jangka waktu singkat setelah bencana terjadi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi bencana masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan darurat jangka pendek, seperti distribusi logistik, dan belum secara optimal menjangkau aspek pemulihan jangka panjang yang bersifat sosial dan psikologis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2023) yang menekankan bahwa pendekatan mitigasi bencana modern harus mencakup dimensi psikososial sebagai bagian integral dari proses pemulihan. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada aspek fisik dan mengabaikan dampak sosial yang berkelanjutan, maka proses pemulihan masyarakat menjadi tidak utuh dan berpotensi memperpanjang kondisi kerentanan.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan rendahnya kecukupan (adequacy) kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, karena kebijakan belum mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam aspek pemulihan sosial dan ekonomi (Dunn, 2018). Lebih lanjut, dalam kerangka kerentanan sosial yang dikembangkan oleh Piers Blaikie, kegagalan dalam menyediakan perlindungan ekonomi dan dukungan psikososial justru memperkuat siklus kerentanan yang dialami masyarakat terdampak (Blaikie et al., 1994). Dengan demikian, dampak bencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berkembang menjadi krisis sosial yang berulang apabila tidak ditangani secara komprehensif.

Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan mitigasi bencana sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis ke dalam kerangka kebijakan secara menyeluruh. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada penanganan darurat tanpa diikuti dengan strategi pemulihan jangka panjang, maka kebijakan tersebut cenderung gagal dalam memutus siklus kerugian dan trauma yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kebijakan mitigasi bencana memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur dan logistik, tetapi juga pada perlindungan ekonomi masyarakat serta pemulihan kondisi psikologis secara berkelanjutan.

Partisipasi Semu dan Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana masih bersifat terbatas dan belum substantif. Warga dan tokoh adat mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka cenderung terjadi pada tahap

implementasi, seperti kegiatan evakuasi, pemindahan barang, atau kerja bakti pascabencana, namun tidak pada tahap perencanaan kebijakan. Dalam beberapa kasus, keputusan strategis seperti penentuan lokasi pembangunan infrastruktur mitigasi, termasuk pembangunan siring, dilakukan tanpa mempertimbangkan secara serius masukan dari masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme partisipasi formal dan praktik partisipasi yang terjadi di lapangan.

Fenomena tersebut mencerminkan apa yang dalam literatur pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai partisipasi semu (*tokenism*), di mana keterlibatan masyarakat bersifat simbolik dan tidak memberikan ruang nyata dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abidin (2023), partisipasi yang efektif seharusnya berlangsung sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan, bukan sekadar pada tahap pelaksanaan. Ketika masyarakat hanya dilibatkan sebagai pelaksana tanpa diberi ruang untuk menentukan arah kebijakan, maka partisipasi kehilangan substansinya dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan rendahnya responsivitas kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, karena kebijakan belum mampu merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara memadai (Dunn, 2018). Lebih lanjut, dalam kerangka kerentanan sosial yang dikembangkan oleh Piers Blaikie, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat kerentanan, karena kebijakan yang dihasilkan tidak berbasis pada pengetahuan lokal yang relevan dengan kondisi risiko di lapangan (Blaikie et al., 1994). Dengan demikian, kegagalan dalam mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau administratif, tetapi juga dengan kegagalan dalam memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan risiko bencana.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan kebijakan, tetapi juga pada menurunnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program mitigasi yang dijalankan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara substantif, maka komitmen terhadap keberlanjutan program menjadi lemah. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan mitigasi bencana sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun mekanisme partisipasi yang inklusif dan bermakna. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan.

5. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam mitigasi krisis sosial akibat banjir tahunan di Kabupaten Kutai Barat tahun 2024 masih belum optimal. Meskipun pemerintah mampu menunjukkan respons awal yang relatif cepat dalam fase tanggap darurat, efektivitas kebijakan secara keseluruhan masih terbatas, terutama pada aspek pemulihan jangka panjang dan upaya mitigasi yang berkelanjutan. Dalam kerangka evaluasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya dimensi efektivitas, responsivitas, dan kecukupan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak secara komprehensif.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi rendahnya efektivitas kebijakan. Pertama, lemahnya koordinasi antarinstansi dalam fase tanggap darurat menunjukkan adanya keterbatasan dalam integrasi kelembagaan,

sehingga respons yang diberikan belum sepenuhnya efisien dan terarah. Kedua, ketidaktepatan program fisik yang mengabaikan kearifan lokal menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang kontekstual dan tidak mampu mengurangi risiko banjir secara efektif. Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keempat, kebijakan mitigasi yang masih berfokus pada aspek logistik darurat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap dimensi sosial dan psikologis, seperti trauma dan kerentanan ekonomi berulang. Kelima, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan mencerminkan adanya praktik partisipasi semu yang berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program mitigasi.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam mitigasi bencana di Kabupaten Kutai Barat tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kelemahan tata kelola kebijakan dalam mengintegrasikan dimensi kelembagaan, sosial, dan partisipatif. Dalam perspektif kerentanan sosial, kondisi tersebut berpotensi memperkuat siklus krisis sosial yang berulang, di mana masyarakat terus berada dalam kondisi rentan akibat kebijakan yang belum mampu menjawab kebutuhan mereka secara menyeluruh.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan mitigasi bencana memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kontekstual. Kebijakan tidak hanya perlu berfokus pada respons darurat, tetapi juga harus mampu mengakomodasi pemulihan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam implementasinya. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat secara substantif menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lokal dan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Abidin, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (D. E. Winoto, Ed.; 1st ed.). Cv.Eureka Media Aksara.
- Adhariani, S., & Afrizal, A. (2021). Palm Oil and Natural Disasters: Sociological Meanings of Discourses on the Ecological Impact of Oil Palm Expansion. *Society*, 9(1), 37–53. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.286>
- Agustinus, A. (2022). Kelapa Sawit sebagai Penyebab Bencana Ekologis - Laudato Si Artikel 29-30. *Forum*, 51(2), 223–234. <https://doi.org/10.35312/forum.v51i2.445>

- Bakar, & Mas, R. (2018). *Buku Ajar Wawancara (Konsep & Teknik Dasar Dalam Wawancara Informasional, Survei, Rekrutmen, Konseling & Focus Group Discussion)*. Eprints Universitas Negeri Makassar.
- Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (1994). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge.
- Herdiansyah, H. (2019). *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif (1st ed., Vol. 1)*. Rajawali Pers.
- Hidayat, A. (2023). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Dan Strategi Adaptasi Yang Diterapkan Oleh Petani (2). In *Universitas Medan Area*.
- Kapucu, N. (2006). Interagency communication networks during emergencies: Boundary spanners in multiagency coordination. *American Review of Public Administration*, 36(2), 207-225. <https://doi.org/10.1177/0275074005280605>
- Mahmud, M. (2022). Skenario Konservasi Tanah pada Perkebunan Sawit sebagai Upaya Mitigasi Limpasan Permukaan pada DAS Arui, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(1), 129-139. <https://doi.org/10.18343/jipi.28.1.129>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Padang, J. R., Sundari, Y. S., & Suratmi, S. (2020). Analisis Sistem Saluran Drainase untuk Menanggulangi banjir pada Jalan Gajah Mada Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknik Sipil*, ##, No. ##, 1-16. <https://doi.org/10.31293/teknikd>
- Paimin, P., Sukresno, S., & Pranomo, I. B. (2009). *Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor*. Tropenbos Internasional Indonesia Programme. www.tropenbos.org
- Putra, R. W. (2015). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah di Kabupaten Kutai Barat. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1940-1951.
- Rosyida, A., Azis, M., Firmansyah, Y., Setiawan, T., Pangesti, K. P., Kakanur, F., & Assaudi, B. (2025). *Data Bencana Indonesia 2024 (A. Muhari, T. Harjito, F. Irawan, & A. C. Utomo, Eds.; 1st ed., Vol. 1)*. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 2(2), 91-102.

UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations.

Utomo, A. C., & Irawan, F. (2024). Info Bencana Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual. *Info Bencana*, 5(3), 1–16.
